

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Komunikasi merupakan sebuah kegiatan penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi adalah sebuah kebutuhan yang mendasar bagi seseorang untuk berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain. Hal tersebut sesuai dengan keadaan pada saat ini, bahwa manusia membutuhkan komunikasi baik secara individu ataupun kelompok. Salah satunya adalah kehadiran komunikasi massa, yang sangat berhubungan erat dengan kehidupan manusia. Wiryanto (2010:03) mendefinisikan komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi *interposed* ketika antara sumber dan penerima tidak terjadi kontak secara langsung, pesan-pesan komunikasi mengalir kepada penerima melalui saluran-saluran media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, film atau televisi. Media massa dibutuhkan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Pada media massa, masyarakat dapat memperoleh berbagai macam informasi baik informasi positif ataupun informasi negatif. Oleh karena itu, penting bagi sebuah perusahaan atau instansi pemerintah memiliki sebuah divisi yang memantau peredaran informasi mengenai lembaga tersebut. Divisi yang bertugas untuk memantau dan mengontrol peredaran informasi dalam sebuah lembaga yaitu divisi hubungan masyarakat.

Hubungan masyarakat (humas) atau yang disebut juga sebagai *public relations* merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik organisasi bersifat komersil (perusahaan) maupun nonkomersil (Anggoro 2011). Pada dasarnya perbedaan utama antara fungsi dan tugas humas yang terdapat di perusahaan dan instansi pemerintah yaitu tidak ada sesuatu yang diperjual belikan atau transaksi terjadi, baik berbentuk produk barang ataupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak lain. Fungsi pokok dari humas pemerintah antara lain mengamankan kebijakan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya, memberikan pelayanan, menyebarkan pesan-pesan dan informasi atau mensosialisasikan mengenai kebijakan instansi baik secara nasional ataupun daerah kepada masyarakat (Ruslan 2010). Fungsi lainnya adalah menjadi komunikator sekaligus mediator yang menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi atau opini publik, berperan aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Salah satu instansi pemerintah yang memiliki Divisi Humas yang disebut dengan Divisi Humas Mabes Polri Jakarta.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri Jakarta) adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Mabes Polri Jakarta terletak di Jalan Trunojoyo No.03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Secara umum Divisi Humas Mabes Polri Jakarta adalah sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hubungan masyarakat pada tingkat Polri yang berada di bawah Kapolri. Pada Divisi Humas Mabes Polri Jakarta mempunyai lima bagian yaitu bagian penerangan satuan, bagian mitra, bagian penerangan umum, bagian produksi, bagian yaninfodok, dan bagian anev. Humas juga bertugas untuk mengawasi peredaran informasi dan opini-opini masyarakat tentang instansi Polri yaitu melalui kegiatan *media monitoring*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Media monitoring merupakan kegiatan internal Divisi Humas Mabes Polri Jakarta yang bertujuan untuk mengetahui berita-berita yang beredar di media massa terkait instansi Polri. *Media monitoring* dilakukan dengan cara mendokumentasikan berita-berita dari media massa dengan cara dibuat kedalam sebuah *klipping*. Berita tersebut akan dikategorikan ke dalam berita positif, berita netral, dan berita negatif. Berita positif adalah berita terkait kegiatan positif Mabes Polri Jakarta, sedangkan berita negatif adalah berita yang dapat merugikan atau berisikan opini negatif mengenai instansi Polri. Berita negatif yang telah diproses dan ditanggapi oleh Mabes Polri Jakarta baik itu dengan tindakan maupun dengan klarifikasi seperti *press release* dan *press conference* akan dikategorikan sebagai berita netral. Kegiatan *media monitoring* bertujuan untuk meningkatkan citra instansi Polri. Citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan seseorang terhadap suatu objek tertentu (Ruslan 2010). Citra merupakan tujuan pokok suatu perusahaan atau lembaga, terciptanya citra yang baik dimata khalayak atau publiknya akan menguntungkan lembaga tersebut. Citra positif dapat terbentuk bila publik mempunyai persepsi yang positif terhadap perusahaan (Kriyatno 2016:40). Hasil kegiatan *media monitoring* dilakukan dengan cara menanggapi sebuah berita atau isu dan mengklarifikasi berita tersebut sehingga tidak ada lagi opini ataupun berita negatif terkait lembaga tersebut akan membentuk citra yang baik di mata masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini akan mengkaji mengenai sistem *media monitoring* beserta hambatan yang dialami oleh bagian penerangan satuan Divisi Humas Mabes Polri Jakarta.



Sekolah Vokasi
Rumusan Masalah
College of Vocational Studies

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses *media monitoring* di Divisi Humas Mabes Polri Jakarta?
- 2) Bagaimana proses pembuatan majalah *Tribrata News*?
- 3) Apa saja hambatan yang dihadapi pada saat pembuatan *media monitoring* dan bagaimana solusi yang dilakukan Divisi Humas Mabes Polri Jakarta?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka laporan akhir ini bertujuan untuk:

- 1) Menjelaskan bagaimana proses pembuatan *media monitoring* di Divisi Humas Mabes Polri Jakarta.
- 2) Menjelaskan proses pembuatan majalah *Tribrata News*.
- 3) Menjelaskan apa saja hambatan yang terjadi dalam proses *media monitoring* dan bagaimana untuk menyelesaikan hambatan tersebut.

METODE

Lokasi dan Waktu

Lokasi pengumpulan data berdasarkan Praktik Kerja Lapangan untuk melengkapi Laporan Akhir ini dilakukan di Divisi Humas Mabes Polri Jakarta Jakarta yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Waktu pengumpulan data dilaksanakan selama dua bulan dari tanggal 24 Juni sampai 16 Agustus 2019. Waktu pelaksanaan dilakukan pada hari Senin hingga Jumat pukul 07.00-15.00 WIB.

Data dan Instrumen

Data dan instrumen merupakan hal penting yang digunakan untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Data adalah bahan penting yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan digunakan sebagai bukti dari permasalahan yang ada. Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akurat. Jenis data dan instrumen yang digunakan dalam Laporan Akhir sebagai berikut:

- 1) Data primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber yaitu pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang didasarkan pada pengamatan langsung di lapangan dan wawancara langsung dengan Anggota Divisi Humas Mabes Polri Jakarta .
- 2) Data sekunder
Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari hasil studi pustaka seperti buku dan internet dengan cara mengkaji informasi yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Data tersebut diperoleh dari arsip-arsip dan *website* resmi Divisi Humas Mabes Polri Jakarta .
- 3) Instrumen
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menulis laporan ini adalah daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber, selain itu adapun alat-alat yang digunakan selama proses pengumpulan data yaitu *laptop*, *flashdisk*, *smartphone*, dan alat-alat tulis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh informasi dengan membandingkan standar dan ukuran yang sudah ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- 1) Partisipasi aktif
Partisipasi aktif dilakukan dengan ikut serta dan terlibat langsung dalam proses kerja bersama dengan personel penerangan satuan Divisi Humas Mabes Polri Jakarta.



- 2) Observasi langsung
Pengamatan secara langsung dalam melakukan kegiatan personel bagian penerangan satuan di Divisi Humas Mabes Polri Jakarta yaitu media monitoring.
- 3) Wawancara
Wawancara dilakukan dengan pembimbing lapangan saat Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung dengan personel bagian penerangan satuan Divisi Humas Mabes Polri Jakarta.
- 4) Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data dengan mencari sebuah referensi dan internet untuk menunjang materi yang dibahas dalam penulisan laporan akhir.

GAMBARAN UMUM MABES POLRI JAKARTA

Sejarah Singkat Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah naungan Presiden Republik Indonesia. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disebut Polri. Bibit awal mula terbentuknya kepolisian sudah ada sejak zaman dahulu, tepatnya pada zaman kerajaan Majapahit. Pada saat itu Patih Gajah Mada membenteng pasukan keamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Hingga saat ini sosok Patih Gajah Mada merupakan simbol Kepolisian Republik Indonesia dan sebagai penghormatan jasa tersebut, Polri membangun patung Gajah Mada di depan Kantor Mabes Polri Jakarta dan sebagai bentuk penghormatan lainnya. Nama Bhayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian.

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, memilih 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu oleh asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procereur general* (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *culture politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara pada waktu itu, kepolisian menerapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Orang pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), *inspekteur van politie*, dan *commisaris van politie*. Orang pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantra polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 sampai tahun 1920 merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada masa pemerintahan Jepang, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta,